

RENJA 2023



BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar :

1. Rencana Pembangunan Daerah
2. Rencana Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu : RPJPD, RPJMD, RKPD, sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu : Renstra dan Renja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu dari sekian banyak perangkat daerah yang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yaitu renstra dan renja, dimana renja atau rencana kerja itu merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategis yang disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Sejalan dengan Visi dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, maka dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPKAD Kota Cimahi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan, program, indikator dan sasaran yang telah disusun dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kota Cimahi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d akhir tahun 2021
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Nilai LKIP	100%	100%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan dan 2 Dokumen	14 Laporan dan 2 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Gaji ASN Selama 1 Tahun	14 Laporan	14 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen

1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	7 Paket	7 Paket
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor beserta pemeliharaannya	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan-bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gudang Kantor	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2 Paket	2 Paket
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon	1 Paket	1 Paket
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	1 Paket	1 Paket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Paket	3 Paket
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Paket	3 Paket
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Utilitas Aset	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	14 Dokumen	16 Dokumen

1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Yang Disusun Tepat Waktu	382 Laporan	382 Laporan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Laporan	36 Laporan
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	224 Laporan	224 Laporan

1	2	3	4
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Laporan	5 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	105 Laporan	105 Laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	24 Dokumen/ Laporan	24 Dokumen/ Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan

1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Laporan	1 Laporan
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 Laporan	15 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan

1	2	3	4
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Utilitas Aset	100%	100%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	28 Dokumen	26 Dokmen
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	-
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	15 Dokumen	15 Dokumen
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen

1	2	3	4
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimaslisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	5 Dokumen	5 Dokumen
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-
Jumlah			

Selain itu capaian kinerja dapat dilihat melalui realisasi keuangan dan fisik dari belanja BPKAD yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Kota Cimahi
Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan			Sisa Anggaran
		Realisasi	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	57.145.834.859	39.154.473.064	99%	69%	17.991.361.795
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	30.380.673.269	23.966.190.416	100%	79%	6.414.482.853
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	34.095.800	26.429.000	100%	78%	7.666.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.230.800	24.102.000	100%	80%	6.128.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.865.000	2.327.000	100%	60%	1.538.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.237.243.969	22.898.337.047	100%	78%	6.338.906.922

PR

1	2	3	4	5	6
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.232.248.369	22.894.407.047	100%	78%	6.337.841.322
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.829.000	3.690.000	100%	96%	139.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.166.600	240.000	100%	21%	926.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	658.255.000	625.451.204	100%	95%	32.803.796
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	410.136.000	377.24.650	100%	92%	32.711.350
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.482.500	37.422.500	100%	99%	60.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.996.500	14.996.000	100%	99%	500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.640.000	195.608.054	100%	99%	31.946
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.675.000	300.000.000	100%	92%	27.675.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.675.000	300.000.000	100%	92%	27.675.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.778.500	42.909.924	100%	90%	4.868.576
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000	230.300	100%	35%	469.700
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.078.500	42.679.624	100%	91%	4.398.876
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.625.000	73.063.241	100%	97%	2.261.759
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.625.000	73.063.241	100%	97%	2.261.759
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	26.007.753.990	14.547.306.914	100%	56%	11.460.447.076

1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	363.793.900	344.961.300	100%	95%	18.832.600
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	15.016.100	14.827.500	100%	99%	188.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13.890.100	13.811.500	100%	99%	78.600
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	123.138.400	115.195.000	100%	94%	7.943.400
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	14.920.800	14.665.000	100%	98%	255.800
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	1.989.100	1.862.000	100%	94%	127.100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	5.006.000	4.998.000	100%	99%	8.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	57.779.600	48.492.600	100%	84%	9.287.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.000.000	79.637.100	100%	99%	362.900
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.016.000	23.468500	100%	98%	547.500
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	28.037.800	28.004.100	100%	99%	33.700
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	124.670.300	117.913.124	100%	95%	6.757.176
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41.176.600	38.110.874	100%	93%	3.065.726
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.787.400	11.066.775	100%	94%	720.625

1	2	3	4	5	6
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasim Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22.386.400	21.591.975	100%	96%	794.425
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35.640.900	34.384.500	100%	96%	1.256.400
Rasionalisasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	13.679.000	12.759.000	100%	93%	920.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	653.582.400	618.848.433	100%	95%	34.733.967
Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	279.677.800	265.623.800	100%	95%	265.623.800
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	162.147.900	153.884.671	100%	95%	8.263.229
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD Kabupaten/Kota	84.567.000	83.338.762	100%	98%	1.318.238
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kcrugian Dacrah	8.417.900	3.723.400	100%	44%	4.694.500

1	2	3	4	5	6
Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	91.099.700	87.876.400	100%	96%	3.223.300
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	15.175.700	13.057.200	100%	86%	2.118.500
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	12.406.400	11.344.200	100%	91%	1.062.200
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah	24.480.085.890	13.102.300.557	100%	54%	11.377.785.333
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	600.000.000	308.874.114	100%	51%	291.125.886
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.880.085.890	12.793.426.443	100%	54%	11.086.659.447
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	385.621.500	363.283.500	100%	94%	22.338.000
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	385.621.500	363.283.500	100%	94%	22.338.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	757.407.600	640.975.734	97%	85%	116.431.866
Pengelolaan Barang Milik Daerah	757.407.600	640.975.734	97%	85%	116.431.866
Penyusunan Standar Harga	227.891.100	222.153.600	100%	97%	5.737.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.963.400	28.302.000	100%	94%	1.661.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah	73.600.000	73.548.000	100%	99%	52.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	110.003.600	94.019.494	100%	85%	15.894.106
Pengamanan Barang Milik Daerah	110.610.300	68.220.140	80%	62%	42.390.160
Penilaian Barang Milik Daerah	102.750.000	86.000.100	90%	84%	16.749.900
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	100%	0

1	2	3	4	5	6
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	80.900.000	47.061.200	100%	58%	33.838.800
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.689.200	11.671.200	100%	99%	18.000
Jumlah	57.145.834.859	39.154.473.064	99%	69%	17.991.361.795

Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2021 bermakna sangat berhasil karena pencapaiannya sebesar 103,67 %. Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2021 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BPKAD
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	60%	66,7 %	111 %
Rata - Rata Capaian						103,67 %

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan dan Pencatatan Aset
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran
- c. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota
- d. Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD
- e. Pemanfaatan Aset

2. Rekomendasi dan Catatan Strategis

- a. Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi Pencatatan Aset.
- b. Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran
- c. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Cimahi
- d. Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Tujuan Strategik tersebut yaitu Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset.

3.2 Program dan Kegiatan

3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			49.594.622.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.452.984.900
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	100%	31.845.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	23.115.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	8.730.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran dan ASN yang mendapatkan pelayanan	100%	18.102.064.998
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	42 Orang	18.094.622.998
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.440.000
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	3.002.000
Adminisrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100%	10.000.000
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah yang diberikan	100%	1.714.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.714.500
Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diberikan	100%	738.195.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	159.184.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	53.772.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.069.800

1	2	3	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	373.362.900
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	85.707.000
Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	39.150.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	332.148.502
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	332.148.502
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	100%	20.516.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.116.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	216.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 kendaraan R2 dan 9 Kendaraan R4	216.500.000
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			28.341.37.100
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.291.637.100
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	88.599.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	76.963.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	232.660.200
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	292.262.400
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Aplikasi	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen Perda 1 dokumen Perwal Penjabaran APBD	100.128.600

Handwritten signature/initials

1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen Perda 3 dokumen Perwal Penjabaran APBD	99.192.200
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen (SE Pedum)	142.609.500
	Jumlah laporan Fasilitas kebijakan Regulasi Penganggaran		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 dokumen	76.176.400
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 dokumen	70.076.400
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	69.546.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	450.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 dokumen (RKUD)	58.613.200
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240 dokumen (SPD)	32.727.800
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 dokumen	37.331.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 laporan	38.478.900
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 BA (Rekon Penerimaan dan Pengeluaran)	35.673.300
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	86.447.600

1	2	3	4
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	160.728.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	850.000.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- 20 dokumen (dok pendukung lap bulanan, triwulan, semesteran) - 1 dokumen (rekon) - 1 data valid (validasi transaksi pendapatan dan belanja)	34.677.800
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- 1 laporan (analytical Review Lap Keuangan) - 2 laporan (lap.keu pemda)	467.438.600
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- 1 dokumen Rancangan PP APBD TA 2020 - 1 dokumen Rancangan Penjabaran PP APBD TA 2020	71.823.400
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- 1 dokumen (Tinjut LHP BPK) - 1 kasus (kasus kerugian daerah yang terselesaikan pada th berjalan)	36.442.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen (modul kebijakan akuntansi/sistem akuntansi pemda)	69.308.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen (SOP Penyusunan Laporan Keuangan)	61.810.200
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang	53.268.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 BLUD	28.747.200
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan statistik Pemda	26.484.0000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Belanja Bunga dan Belanja Tidak Terduga	100%	25.500.000.000

	1	2	3	4
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	500.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	1 Laporan	25.000.000.000
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Aplikasi SIPD	100%	250.000.000
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	30 SKPD	250.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset	70%	1.800.000.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen (SSH)	175.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen (Raperwal kebijakan BMD)	25.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	220.000.000
		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
		Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	15 Laporan	750.000.000
		Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	150.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	25.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimaslisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	5 Dokumen	150.000.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	15.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000

Handwritten signature

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Cimahi, 29 April 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAH,



drg. CHANIFAH LISTYARINI, MHM
NIP. 19670320 199203 2 005